



MODEL DATA PANEL
Adler Haymans Manurung

MENUJU *KNOWLEDGE WORKER* MENJAWAB TANTANGAN PENGELOLAAN
SEKTOR KETENAGALISTRIKAN 2030 DI INDONESIA

Manerep Pasaribu
Zulkarnaen Sadikin

KEJAHATAN DIMENSI BARU DI BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN SERTA
UPAYA PENANGGULANGANNYA

Tigor Sitorus

DINAMIKA *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* DALAM PEMBENTUKAN
INTELLECTUAL CAPITAL : SEBUAH KAJIAN *INTERPRETIVE* PADA FAKULTAS
EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO

Magdalena Judika Siringoringo
Oloan Simanjuntak

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH WILAYAH PANTAI TIMUR,
PANTAI BARAT, DAN DATARAN TINGGI PROVINSI SUMATRA UTARA

Elvis F. Purba

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI TENAGA KERJA WANITA SEKTOR INFORMAL
DI KECAMATAN MEDAN BARU

Dame Esther M. Hutabarat Nancy Nopeline



F E U H N

Volume III, No 2, Juli 2012

ISSN 2086-6879

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Volume III, No. 2

Juli 2012

- MODEL DATA PANEL
Adler Haymans Manurung 69-88
- MENUJU *KNOWLEDGE WORKER* MENJAWAB TANTANGAN PENGELOLAAN
SEKTOR KETENAGALISTRIKAN 2030 DI INDONESIA 89-103
Manerep Pasaribu
Zulkarnaen Sadikin
- KEJAHATAN DIMENSI BARU DI BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN
SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA 104-121
Tigor Sitorus
- DINAMIKA *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE* DALAM PEMBENTUKAN
INTELLECTUAL CAPITAL: SEBUAH KAJIAN INTERPRETIVE PADA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS DIPONEGORO 122-132
Magdalena Judika Siringoringo
Oloan Simanjuntak
- KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH WILAYAH PANTAI TIMUR,
PANTAI BARAT, DAN DATARAN TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA 133-142
Elvis F. Purba
- KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI TENAGA KERJA WANITA
SEKTOR INFORMAL DI KECAMATAN MEDAN BARU 143-153
Dame Esther M. Hutabarat
Nancy Nopeline

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARDAERAH WILAYAH PANTAI TIMUR, PANTAI BARAT, DAN DATARAN TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

Elvis F. Purba¹

Abstract

This paper discusses the interregional development inequality in East Coast, West Coast, and plateau region of North Sumatra. According to the statistical data per capita of Gross Regional Domestic Product (PDRB) at 2000 constant price and the number of people, and by using the regional disparity index which formulated by Jeffrey Williamson, are known the development inequality for each regions in 2000-2010. Degree of development inequality towards increasing, except for the plateau region. Development inequality is worst in North Sumatra Province compare to East Coast or West Coast and plateau regions. Thus, disparity of income distribution in plateau region is lower than West Coast or East Coast, or North Sumatra overall.

Keyword : interregional development, inequality, income distribution, PDRB, resources mobility.

1. PENDAHULUAN

Kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara sering dikelompokkan atas 3 wilayah, yaitu wilayah Pantai Timur, Pantai Barat dan Pegunungan (Tanjung, 2007). Kota-kota dan atau kabupaten yang ada di masing-masing wilayah mempunyai potensi yang agak berbeda, walaupun secara umum Provinsi Sumatera Utara, khususnya di semua kabupaten, sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembentukan PDRBnya. Secara kasat mata ada anggapan bahwa pembangunan ekonomi di ketiga wilayah tersebut berbeda dan wilayah Pantai Timur dianggap sebagai daerah yang lebih maju dibandingkan dengan wilayah lainnya karena di sana terdapat perkebunan-perkebunan besar. Sebaliknya, wilayah Dataran Tinggi dan Pantai Barat dianggap sebagai daerah yang kurang maju. Apabila pendapat tersebut benar, tentu sangat mungkin ketimpangan pembangunan ekonomi sudah lama terjadi dan akan semakin melebar seiring dengan berlangsungnya pembangunan dan berlalunya waktu. Ketimpangan yang terjadi dapat juga menyebabkan mobilitas sumberdaya dari daerah yang kurang maju ke daerah yang lebih maju dan akibatnya ketimpangan pembangunan akan semakin lebar lagi. Situasi demikian tentulah menjadi masalah bagi pemerintah, bukan hanya bagi kabupaten atau kota tetapi bagi pemerintah provinsi dan juga bagi pemerintah pusat.

Masalah ketimpangan pembangunan antarwilayah telah banyak dibahas para ahli, baik secara teoritis maupun empiris. Tulisan-tulisan dan penelitian terdahulu yang mengupas masalah ketimpangan ekonomi regional di Indonesia, diantaranya oleh J.S Uppal dan Budiono Sri Handoko (1986) yang berjudul "Regional Income Disparities in Indonesia" dalam Majalah

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan

Ekonomi dan Keuangan Indonesia (EKI). Kemudian tulisan Adler Haymans Manurung (1991) yang berjudul "Ketimpangan Spasial dan Kemiskinan di Indonesia" yang diterbitkan dalam Buletin Ilmiah Tarumanegara. Khusus untuk daerah Sumatera Utara dapat disebutkan beberapa penelitian tentang ketimpangan pembangunan, antara lain penelitian Sianturi (2005), Sihotang (2008), Purba (2012), dan Simanjuntak (2012). Tulisan dan penelitian tersebut menggunakan formula tertentu untuk mencari indeks ketimpangan antardaerah dan menafsirkannya.

Salah satu data yang selalu dipublikasi BPS adalah data produk regional per kapita (PDRB per kapita). Data ini memang memiliki beberapa kelemahan metodologi sebagai indeks kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2007; Purba, 2011) akan tetapi sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dan bahkan membandingkan keberhasilan pembangunan antarwilayah. Dan berdasarkan data PDRB per kapita akan dianalisis apakah indeks ketimpangan pembangunan antardaerah atau antarwilayah semakin besar atau semakin kecil.

2. METODE PENELITIAN

Formula sederhana untuk menghitung indeks ketimpangan pembangunan adalah yang dikemukakan oleh Jeffry Williamson yang dikenal dengan koefisien disparitas regional atau Indeks Williamson (Sjafrizal, 2008; Kuncoro, 2004). Indeks ketimpangan tersebut mempunyai nilai antara nol dan satu indeks yang semakin besar berarti derajat ketimpangan semakin buruk, yang bermakna bahwa ketimpangan pembangunan semakin meningkat. Sebaliknya, bila indeks tersebut semakin kecil berarti derajat ketimpangan pembangunan semakin baik dalam arti ketimpangan pembangunan semakin menurun.

Tulisan ini memberi deskripsi tentang bagaimana derajat ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, yakni antarkota dan kabupaten yang ada di wilayah Pantai Barat, Pantai Timur, dan wilayah Dataran Tinggi.

Dua variabel yang digunakan untuk menghitung indeks ketimpangan adalah PDRB per kapita harga konstan (sebagai proksi pendapatan per kapita) dan jumlah penduduk. Formulanya adalah:

$$V_w = \left\{ \sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 n / N} \right\} : Y$$

dimana Y_i adalah PDRB per kapita kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Y adalah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara, n menyatakan jumlah penduduk kabupaten atau kota yang dikaji, dan N adalah jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara. Setelah dihitung

indeks ketimpangan tersebut, selanjutnya diinterpretasi derajat ketimpangan sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Interpretasi Indeks Williamson

No.	Indeks Williamson	Derajat Ketimpangan
1.	$0,00 \leq V_w \leq 0,20$	sangat rendah
2.	$0,21 \leq V_w \leq 0,40$	rendah
3.	$0,41 \leq V_w \leq 0,61$	sedang
4.	$0,61 \leq V_w \leq 0,80$	tinggi
5.	$0,81 \leq V_w \leq 1,00$	sangat tinggi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Regionalisasi Provinsi Sumatera Utara

Jumlah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara bertambah banyak sejak pemberlakuan otonomi daerah. Sebagai contoh, pulau Nias yang sebelumnya hanya 1 kabupaten telah mengalami pemekaran dan kini menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. Selain itu kabupaten yang mengalami pemekaran dalam 10 tahun terakhir adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu. Banyaknya kabupaten dan kota untuk ketiga wilayah yang disebutkan di atas hingga tahun 2010 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara Menurut Wilayah Tahun 2010

Pantai Barat (Kabupaten/Kota)	Dataran Tinggi (Kabupaten/Kota)	Pantai Timur (Kabupaten/Kota)
1. Nias Selatan	1. Tapanuli Utara	1. Langkat
2. Nias	2. Toba Samosir	2. Deli Serdang
3. Tapanuli Selatan	3. Humbang Hasundutan	3. Serdang Bedagai
4. Mandailing Natal	4. Dairi	4. Labuhan Batu
5. Tapanuli Tengah	5. Pakpak Bharat	5. Tanjung Balai
6. Padangsidempuan	6. Tanah Karo	6. Asahan
7. Sibolga	7. Simalungun	7. Binjai
8. Padanglawas	8. Samosir	8. Tebing Tinggi
9. Padanglawas Utara	9. Pematangsiantar	9. Medan
10. Gunung Sitoli		10. Batubara
11. Nias Utara		11. Labuhan Batu Utara
12. Nias Barat		12. Labuhan Batu Selatan

Sumber: Diadopsi dari Tanjung, 2007 dan Sumatera Utara Dalam Angka 2011.

3.2. Gambaran Umum PDRB Per Kapita Antarwilayah

Berdasarkan data sekunder yang diterbitkan BPS, ternyata tidak satu kabupaten atau kota pun di wilayah Pantai Barat yang mempunyai PDRB per kapita melebihi PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya sebagian besar kabupaten yang ada di wilayah Dataran Tinggi masih dibawah pendapatan per kapita provinsi. Kecuali Kabupaten Karo (sepanjang tahun pengamatan) dan Toba Samosir (mulai tahun 2003 hingga 2010), PDRB per kapita kabupaten dan kota lain yang ada di wilayah Dataran Tinggi selalu lebih kecil dibandingkan dengan PDRB per kapita Propinsi Sumatera Utara. Akan tetapi PDRB per kapita wilayah Dataran Tinggi masih lebih besar dibandingkan dengan wilayah Pantai Barat.

Berbeda dengan kedua wilayah tersebut, dilihat dari sumberdaya yang dimilikinya, wilayah Pantai Timur lebih baik dibandingkan dengan wilayah Dataran Tinggi apalagi wilayah Pantai Barat. Sebagian wilayah Pantai Timur merupakan daerah perkebunan. Kabupaten Labuhan Batu, Asahan, Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai dan Medan merupakan daerah yang relatif makmur dimana PDRB per kapita masing-masing daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Utara. Data tersebut menggambarkan bahwa masing-masing kabupaten dan kota yang ada di wilayah Pantai Timur relatif lebih makmur dibandingkan dengan wilayah Dataran Tinggi apalagi bila dibandingkan dengan wilayah Pantai Barat.

Apabila data PDRB per kapita dapat digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi berarti pembangunan yang terjadi di masing-masing kabupaten dan atau kota yang ada di wilayah Pantai Barat lebih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan yang dialami Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Sebaliknya, pembangunan yang terjadi di masing-masing kabupaten dan atau kota yang ada di wilayah Dataran Tinggi lebih baik dibandingkan dengan pembangunan yang dialami wilayah Pantai Barat. Kemudian, pembangunan ekonomi yang berlangsung di wilayah Pantai Timur lebih baik dibandingkan dengan wilayah Dataran Tinggi dan wilayah Pantai Barat.

3.3. Gambaran Ketimpangan Pembangunan Antardaerah

Ketimpangan Pembangunan Antardaerah Wilayah Pantai Barat

Ideks ketimpangan pembangunan wilayah Pantai Barat tahun 2000 hingga 2010 berada antara 0,188 hingga 0,221. Indeks tertinggi terjadi tahun 2010 dan terendah adalah tahun 2000. Walaupun rentangnya cukup kecil, namun data ini menunjukkan bahwa derajat ketimpangan pembangunan di wilayah Pantai Barat menunjukkan kecenderungan menaik dari "sangat rendah" (tahun 2000-2004) menjadi "rendah" (tahun 2005-2010) sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Indeks dan Derajat Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pantai Barat

Tahun	Vw	Derajat Ketimpangan Pembangunan
2000	0,188	Sangat rendah
2001	0,198	Sangat rendah
2002	0,195	Sangat rendah
2003	0,199	Sangat rendah
2004	0,193	Sangat rendah
2005	0,202	Rendah
2006	0,201	Rendah
2007	0,202	Rendah
2008	0,205	Rendah
2009	0,202	Rendah
2010	0,221	Rendah

Sumber: Hasil analisis data

Data tersebut menunjukkan bahwa derajat ketimpangan pembangunan antarkabupaten dan atau kota yang ada di wilayah Pantai Barat tergolong relatif merata atau sangat rendah (tahun 2000-2004) dan tergolong rendah (tahun 2005-2010). Kabupaten dan atau kota dengan PDRB per kapita yang relatif rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara ternyata mempunyai derajat ketimpangan pembangunan yang "sangat rendah" dengan kecenderungan menaik menjadi "rendah". Apabila diselidiki lebih jauh tentang perbandingan PDRB per kapitanya, ternyata masing-masing daerah tidak ada yang sangat menonjol. Atau dengan kata-kata lain, variasi PDRB per kapita masing-masing kabupaten dan kota yang ada di wilayah Pantai Barat relatif rendah sehingga derajat ketimpangannya pun cukup rendah.

Ketimpangan Pembangunan Antardaerah Wilayah Dataran Tinggi

Indeks ketimpangan pembangunan wilayah Dataran Tinggi tahun 2000 hingga 2010 berada antara 0,093 hingga 0,119. Indeks tertinggi terjadi tahun 2000 dan terendah tahun 2004 (Tabel 4). Data tersebut menunjukkan bahwa derajat ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota yang ada di wilayah Dataran Tinggi tergolong relatif merata atau sangat rendah sepanjang 11 tahun. Walaupun PDRB per kapita masing-masing daerah lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara ternyata wilayah Dataran Tinggi mempunyai derajat ketimpangan pembangunan yang tergolong sangat rendah dengan kecenderungan menurun. Apabila diselidiki lebih jauh, selain Kabupaten Karo, ternyata Kabupaten Toba Samosir (mulai tahun 2003) mempunyai PDRB per kapita yang lebih tinggi dan sisanya selalu lebih rendah dibandingkan

dengan provinsi. Atau dengan kata-kata lain, derajat ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah Dataran tinggi relatif lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di wilayah Pantai Barat.

Tabel 4. Indeks dan Derajat Ketimpangan Pembangunan Wilayah Dataran Tinggi

Tahun	Ww	Derajat Ketimpangan Pembangunan
2000	0,119	Sangat rendah (relatif merata)
2001	0,108	Sangat rendah (relatif merata)
2002	0,099	Sangat rendah (relatif merata)
2003	0,103	Sangat rendah (relatif merata)
2004	0,093	Sangat rendah (relatif merata)
2005	0,104	Sangat rendah (relatif merata)
2006	0,105	Sangat rendah (relatif merata)
2007	0,107	Sangat rendah (relatif merata)
2008	0,109	Sangat rendah (relatif merata)
2009	0,098	Sangat rendah (relatif merata)
2010	0,102	Sangat rendah (relatif merata)

Sumber: Hasil analisis data

Ketimpangan Pembangunan Antardaerah Wilayah Pantai Timur

Selanjutnya, indeks ketimpangan pembangunan untuk wilayah Pantai Timur tahun 2000 hingga 2010 berada antara 0,289 hingga 0,413. Indeks tertinggi terjadi tahun 2009 dan terendah tahun 2002 (Tabel 5). Data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di wilayah Pantai Timur tergolong "rendah" (tahun 2000-2007) dan meningkat terus hingga "sedang" (tahun 2008-2010). Walaupun PDRB per kapitanya relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah Pantai Barat maupun Dataran Tinggi, ternyata derajat ketimpangan pembangunan di wilayah Pantai Timur tergolong lebih buruk dibandingkan dengan wilayah Pantai Barat apalagi jika dibandingkan dengan wilayah Dataran Tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi di wilayah Dataran Tinggi relatif lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di wilayah Pantai Timur.

Tabel 5. Indeks dan Derajat Ketimpangan Pembangunan Wilayah Pantai Timur

Tahun	Vw	Derajat Ketimpangan Pembangunan
2000	0,296	Rendah
2001	0,289	Rendah
2002	0,291	Rendah
2003	0,302	Rendah
2004	0,315	Rendah
2005	0,290	Rendah
2006	0,328	Rendah
2007	0,398	Rendah
2008	0,401	Sedang
2009	0,413	Sedang
2010	0,410	Sedang

Sumber: Hasil analisis data

Ketimpangan Pembangunan Antardaerah Provinsi Sumatera Utara

Indeks ketimpangan pembangunan secara keseluruhan untuk kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan angka yang semakin besar. Indeks terendah terjadi tahun 2002 (sebesar 0,365) dan tertinggi tahun 2010 (sebesar 0,476) yang disajikan dalam Tabel 6. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antarkota dan kabupaten dalam konteks Provinsi Sumatera Utara cenderung semakin memburuk, yakni dari "rendah" (tahun 2000-2006) menjadi "sedang" (tahun 2007-2010). Jika dibandingkan dengan indeks ketimpangan pembangunan menurut ketiga wilayah utama ternyata ketimpangan dalam skala makro (Provinsi Sumatera Utara) menjadi lebih buruk. Atau dengan kata-kata lain, dalam skala provinsi, ketimpangan pembangunan antardaerah ternyata tidak lebih baik dibandingkan dengan skala wilayah. Semula diduga bahwa ketimpangan pembangunan antardaerah di Provinsi Sumatera Utara mempunyai variasi yang lebih kecil bila dibandingkan dengan antardaerah di ketiga wilayah utama (Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur), akan tetapi ternyata tidak.

Tabel 6. Derajat Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Vw	Derajat Ketimpangan Pembangunan
2000	0,371	Rendah
2001	0,367	Rendah
2002	0,365	Rendah
2003	0,376	Rendah
2004	0,381	Rendah
2005	0,369	Rendah
2006	0,399	Rendah
2007	0,460	Sedang
2008	0,464	Sedang
2009	0,470	Sedang
2010	0,476	Sedang

Sumber: Hasil analisis data

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dirangkum indeks ketimpangan masing-masing wilayah dan sekaligus membandingkannya dengan provinsi (Tabel 7). Ketimpangan pembangunan di wilayah Dataran Tinggi ternyata lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Pantai Barat, wilayah Pantai Timur, dan Sumatera Utara. Artinya distribusi pendapatan di wilayah Dataran Tinggi lebih rendah ketimpangannya dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

Data dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa indeks ketimpangan untuk masing-masing wilayah cenderung menaik yang bermakna bahwa distribusi pendapatan cenderung semakin buruk, kecuali di wilayah Dataran Tinggi. Distribusi pendapatan di wilayah Dataran Tinggi lebih baik dibandingkan dengan distribusi pendapatan di wilayah Pantai Barat maupun Pantai Timur. Sementara itu distribusi pendapatan di wilayah Pantai Barat lebih baik dibandingkan dengan wilayah Pantai Timur dan distribusi pendapatan wilayah Pantai Timur lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.

Tabel 7. Perbandingan Indeks Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara, 2000-2010

Tahun	Dataran Tinggi	Pantai Barat	Pantai Timur	Sumatera Utara
2000	0,119	0,118	0,296	0,371
2001	0,108	0,198	0,289	0,367
2002	0,099	0,195	0,292	0,365
2003	0,103	0,199	0,302	0,376
2004	0,093	0,193	0,315	0,381
2005	0,104	0,202	0,290	0,369
2006	0,105	0,201	0,328	0,399
2007	0,107	0,202	0,398	0,460
2008	0,109	0,205	0,401	0,464
2009	0,098	0,202	0,413	0,470
2010	0,102	0,221	0,410	0,476

Sumber: Tabel 3,4,5,dan 6.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Manurung, Adler Haymans, "Ketimpangan Spasial dan Kemiskinan di Indonesia" dalam *Buletin Ilmiah Tarumanegara*, Th. 6 No. 21, 1991, hal. 89-103.
- Purba, Elvis F., Tobing, Juliana L., dan Hutabarat, Dame Esther, *Ekonomi Indonesia*. Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2011.
- Purba, Elvis F., *Ekonomi Regional*. Modul. Medan: Fakultas Ekonomi UHN, 2011.
- Purba, Elvis F., *Ketimpangan Pembangunan Antardaerah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2000-2009*. Laporan Hasil Penelitian, Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2012.
- Sianturi, Sopar, *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2005 (Skripsi tidak diterbitkan).
- Sjafrizal, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media, 2008.
- Sihotang, Parlin L., *Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Pantai Barat Sumatera Utara (Suatu Analisis Dengan Pendekatan Indeks Williamson dan Indeks Pembangunan Manusia)*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2008 (Skripsi tidak diterbitkan).

Simanjuntak, Dedy Afrianto, **Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antaradaerah di Provinsi Sumatera Utara**. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2012 (Skripsi tidak diterbitkan).

Sukirno, Sadono, **Ekonomi Pembangunan**. Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana, 2007.

Tanjung, Farhan I, **Tataran Transportasi Wilayah Sumatera Utara**, Makalah pada Seminar Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Medan, 16 Mei 2007.

Uppal, J.S. and Handoko, Budiono Sri, "Regional Income Disparities in Indonesia" dalam **Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)**, Vol. XXXIV, No. 3, 1986, hal. 287-304.